

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR 21/PJ/2009

TENTANG

TATA CARA PENYAMPAIAN PEMBERITAHUAN
PERPANJANGAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 14 huruf f Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.03/2007 tentang Bentuk dan Isi Surat Pemberitahuan, serta Tata Cara Pengambilan, Pengisian, Penandatanganan, dan Penyampaian Surat Pemberitahuan, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Tata Cara Penyampaian Pemberitahuan Perpanjangan Surat Pemberitahuan Tahunan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.03/2007 tentang Bentuk dan Isi Surat Pemberitahuan, Serta Tata Cara Pengambilan, Pengisian, Penandatanganan, dan Penyampaian Surat Pemberitahuan;

4. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 47/PJ/2008 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan dan Penyampaian Pemberitahuan Perpanjangan Surat Pemberitahuan Tahunan Secara Elektronik (*e-Filing*) Melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG TATA CARA PENYAMPAIAN PEMBERITAHUAN PERPANJANGAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, yang dimaksud dengan:

1. Surat Pemberitahuan yang selanjutnya disebut SPT adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2. SPT Tahunan adalah SPT untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.
3. Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan adalah pemberitahuan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT Tahunan.
4. e-SPTy adalah data Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan Wajib Pajak dalam bentuk elektronik yang dibuat oleh Wajib Pajak dengan menggunakan aplikasi e-SPTy yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
5. Kantor Pelayanan Pajak yang selanjutnya disebut KPP adalah Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar dan/atau tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan.

Pasal 2

- (1) Batas waktu penyampaian SPT Tahunan adalah:
 - a. untuk SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi, paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak; atau
 - b. untuk SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan, paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak.
- (2) Wajib Pajak dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk paling lama 2 (dua) bulan sejak batas waktu penyampaian SPT Tahunan dengan cara menyampaikan Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan.

Pasal 3

- (1) Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2):
 - a. bagi Wajib Pajak Badan atau Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha/pekerjaan bebas disampaikan dalam bentuk formulir kertas (*hardcopy*) 1770-Y/1771-Y/1771-\$Y sebagaimana dimaksud pada Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, atau dalam bentuk data elektronik (e-SPTy);
 - b. bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha/pekerjaan bebas disampaikan dalam bentuk surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.
- (2) Data elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihasilkan dari aplikasi e-SPTy yang dibuat oleh Direktur Jenderal Pajak.
- (3) Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya berlaku untuk Tahun Pajak 2008.

Pasal 4

- (1) Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dibuat secara tertulis dan disampaikan ke KPP sebelum batas waktu penyampaian SPT Tahunan berakhir.
- (2) Wajib Pajak Badan atau Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha/pekerjaan bebas yang mengajukan Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) wajib menyebutkan alasan perpanjangan dan melakukan penghitungan

sementara pajak terutang dalam 1 (satu) Tahun Pajak yang batas waktu penyampaian diperpanjang, serta melampirkan:

- a. Laporan Keuangan Sementara untuk Tahun Pajak yang bersangkutan dari Wajib Pajak itu sendiri (bukan Laporan Keuangan Sementara dari konsolidasi grup);
 - b. Surat Setoran Pajak Penghasilan Pasal 29 sebagai bukti pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang terutang kecuali ada ijin untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 29; dan
 - c. Surat Pernyataan dari Akuntan Publik yang menyatakan audit Laporan Keuangan belum selesai dalam hal Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik.
- (3) Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha/pekerjaan bebas yang mengajukan Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) wajib melampirkan Surat Pernyataan dari pemberi kerja yang menyatakan bahwa bukti potong PPh Pasal 21 (Formulir 1721-A1 dan/atau Formulir 1721-A2) belum diberikan oleh pemberi kerja.
 - (4) Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan wajib ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Kuasa Wajib Pajak.
 - (5) Dalam hal Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan ditandatangani oleh Kuasa Wajib Pajak, Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan wajib dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus.

Pasal 5

- (1) Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) disampaikan:
 - a. secara langsung;
 - b. melalui pos dengan bukti pengiriman surat; atau
 - c. dengan cara lain.
- (2) Cara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat; atau
 - b. *e-Filing* melalui ASP sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Atas penyampaian Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan tanda penerimaan surat dan atas penyampaian Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan Bukti Penerimaan Elektronik.
- (4) Bukti pengiriman surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf a atau tanda penerimaan surat dan bukti penerimaan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi bukti penerimaan Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan.

Pasal 6

- (1) Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dianggap bukan merupakan Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan.

- (2) Apabila Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan dianggap bukan merupakan Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal Pajak wajib memberitahukan kepada Wajib Pajak paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan diterima lengkap di KPP menggunakan surat sebagaimana dimaksud pada Lampiran III Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.
- (3) Dalam hal Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan dianggap bukan merupakan Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Pajak masih dapat menyampaikan kembali Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan sepanjang tidak melampaui batas waktu penyampaian SPT Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
- (4) Apabila Kepala KPP tidak memberikan pemberitahuan kepada Wajib Pajak dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan dianggap diterima:
 - a. sesuai dengan pemberitahuan Wajib Pajak dalam hal Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan tidak melebihi batas waktu; atau
 - b. untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan dalam hal Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan melebihi batas waktu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).

Pasal 7

Dalam hal Wajib Pajak belum siap untuk menyampaikan SPT Tahunan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pemberitahuan Perpanjangan Penyampaian SPT Tahunan yang diajukan sebelumnya, maka Wajib Pajak masih dapat menyampaikan Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan lagi sepanjang tidak melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).

Pasal 8

Wajib Pajak yang belum menyampaikan SPT Tahunan sesuai batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau belum menyampaikan dalam batas waktu perpanjangan penyampaian SPT Tahunan, harus segera diterbitkan Surat Tegoran.

Pasal 9

- (1) Formulir Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan dalam bentuk formulir kertas (*hardcopy*) 1770-Y/1771-Y/1771-\$Y dan aplikasi pengisian e-SPTy dapat diperoleh dengan cara:
 - a) disediakan secara cuma-cuma di KPP atau Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan;
 - b) mengunduh dari *home page* Direktorat Jenderal Pajak, dengan alamat <http://www.pajak.go.id>; atau
 - c) mencetak, menggandakan atau memperbanyak sendiri oleh Wajib Pajak.
- (2) Dalam hal formulir kertas (*hardcopy*) 1770-Y/1771-Y/1771-\$Y belum tersedia, Wajib Pajak dapat menggunakan formulir lama dengan mencoret kata Permohonan dan mengganti dengan kata Pemberitahuan.

Pasal 10

Pada saat berlakunya Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, maka:

1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-04/PJ.33/1998 tentang Perpanjangan Jangka Waktu Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.
2. Keputusan Direktur Jenderal Pajak dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak serta Surat Penegasan, yang bertentangan dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 02 Maret 2009

DIREKTUR JENDERAL,

DARMIN NASUTION
NIP 130605098





DEPARTEMEN KEUANGAN R I
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**PEMBERITAHUAN
 PERPANJANGAN JANGKA WAKTU
 PENYAMPAIAN
 SPT TAHUNAN PPh WP ORANG PRIBADI**

**FORMULIR
 1770 - Y**

- ISI DENGAN HURUF CETAK / DIKETIK
- BERI TANDA "X" DALAM (KOTAK) YANG SESUAI
- ISI DENGAN BENAR, LENGKAP, DAN JELAS SESUAI PETUNJUK PENGISIAN

TAHUN PAJAK

| | | | |
|----------------------|----------------------|------|----------------------|
| BL | TH | BL | TH |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | s.d. | <input type="text"/> |

KEPADA KEPALA KPP
 DI

N P W P :

NAMA WAJIB PAJAK :

ALAMAT TEMPAT TINGGAL :

KOTA / KODE POS :

JENIS USAHA / PEKERJAAN BEBAS : KLU :

MEREK USAHA :

ALAMAT USAHA / PEKERJAAN :

NOMOR TELEPON / FAX :

BERDASARKAN PASAL 3 AYAT (4) UU KUP, DENGAN INI MENGAJUKAN PEMBERITAHUAN PERPANJANGAN JANGKA WAKTU PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN PPh WP ORANG PRIBADI TAHUN PAJAKYANG KE.....(.....) SAMPAI DENGAN TANGGALDENGAN ALASAN:

PENGHITUNGAN SEMENTARA PAJAK PENGHASILAN TAHUN PAJAK YANG TERUTANG ADALAH SEBAGAI BERIKUT :

| | | (DALAM RUPIAH) | |
|----|--|------------------|----|
| 1. | PENGHASILAN KENA PAJAK | > | 1. |
| 2. | PPh YANG TERUTANG | > | 2. |
| 3. | PPh YANG DIPOTONG/DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN DAN YANG DIBAYAR/DIPOTONG/TERUTANG DI LUAR NEGRI | | |
| | a. PPh PASAL 21 | > | a. |
| | b. PPh PASAL 22 | > | b. |
| | c. PPh PASAL 23 | > | c. |
| | d. PPh PASAL 24 | > | d. |
| | e. PPh Ditanggung Pemerintah | > | e. |
| | JUMLAH (a + b + c + d + e) | > | 3. |
| 4. | a. <input type="checkbox"/> PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI b. <input type="checkbox"/> PPh YANG LEBIH DIPOTONG/DIPUNGUT (2 - 3) | | 4. |
| 5. | PPh YANG DIBAYAR SENDIRI : | | |
| | a. PPh PASAL 25 | > | a. |
| | b. STP PPh PASAL 25 (HANYA POKOK PAJAK) | > | b. |
| | c. FISKAL LUAR NEGERI | > | c. |
| | JUMLAH (a + b + c) | > | 5. |
| 6. | a. <input type="checkbox"/> PPh YANG KURANG DIBAYAR b. <input type="checkbox"/> PPh YANG LEBIH DIBAYAR (4 - 5) | | 6. |

o JUMLAH PPh YANG KURANG DIBAYAR TERSEBUT PADA ANGKA 6a TELAH DILUNASI PADA TANGGAL

7. LAMPIRAN :

LAPORAN KEUANGAN SEMENTARA

BUKTI PELUNASAN PPh YANG KURANG DIBAYAR TERSEBUT PADA ANGKA 6a (SURAT SETORAN PAJAK)

SURAT KUASA KHUSUS (BILA DIKUASAKAN)

.....

8. ANGSURAN (SEMENTARA) PPh PASAL 25 TAHUN 1/12 X JUMLAH PADA ANGKA 4a Rp.

9. TANDA TANGAN : TGL

WAJIB PAJAK TANDA TANGAN :
 KUASA TANDA TANGAN :

CATATAN UNTUK DINAS :
 1. DITERIMA TANGGAL :
 2. NAMA PETUGAS / NIP :

PETUNJUK PENGISIAN

I. UMUM

Surat Pemberitahuan Tahunan PPh harus disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak. Berdasarkan Pasal 3 ayat (4) dan ayat (5) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007, Wajib Pajak yang tidak dapat menyampaikan SPT Tahunan pada waktunya dapat memberitahukan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT Tahunan secara tertulis disertai alasan penundaan dan pernyataan mengenai penghitungan sementara pajak terutang dalam satu Tahun Pajak dan bukti pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang terutang. Apabila Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik, Wajib Pajak wajib menyampaikan Surat Pernyataan dari Akuntan Publik yang menyatakan Audit Laporan Keuangan belum selesai diaudit.

Formulir 1770-Y ini merupakan Pemberitahuan Perpanjangan Jangka Waktu Penyampaian SPT Tahunan PPh bagi Wajib Pajak Orang Pribadi.

Tuliskan dengan jelas alasan permohonan perpanjangan waktu, seperti :

- Wajib Pajak mempunyai usaha pada tempat lebih dari satu kota dan Laporan Keuangannya belum dikonsolidasikan.
- Wajib Pajak sedang berada di Luar Negeri dan belum akan kembali ke Indonesia sebelum batas waktu penyampaian SPT.

II. PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR

- angka 1 : Diisi dari hasil pengurangan Penghasilan Neto dari Laporan Keuangan sementara dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) atau hasil pengurangan Penghasilan Neto dari penerapan persentase Norma Penghitungan Penghasilan Neto terhadap peredaran/penerimaan bruto pada Rekapitulasi bulanan peredaran/ penerimaan bruto usaha dengan PTKP.
- angka 2 : Cukup jelas
- angka 3 : Tidak termasuk Pajak Penghasilan yang telah dipotong/ dipungut secara final
- angka 4 : Diisi dari hasil pengurangan angka 2 dengan jumlah angka 3. Bila hasil pengurangannya menunjukkan angka negatif, diisi dalam dua tanda kurung. Contoh: (100.000)
- angka 5 : Cukup jelas
- angka 6 : Diisi dari hasil pengurangan angka 4 dengan jumlah angka 5. Bila hasil pengurangan menunjukkan angka negatif, diisi dalam dua tanda kurung. Contoh: (60.000).
- angka 7 : Lampiran tersebut merupakan persyaratan kelengkapan surat permohonan yang menjadi dasar pertimbangan pemberian ijin perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT Tahunan PPh.
- angka 8 dan 9 : Cukup jelas.



DEPARTEMEN KEUANGAN R I
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**PEMBERITAHUAN
 PERPANJANGAN JANGKA WAKTU
 PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN PPh WP BADAN**

**FORMULIR
 1771 - Y**

- ISI DENGAN HURUF CETAK / DIKETIK
- BERI TANDA "X" DALAM (KOTAK) YANG SESUAI
- ISI DENGAN BENAR, LENGKAP DAN JELAS
 SESUAI PETUNJUK PENGISIAN SPT TAHUNAN
 PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

TAHUN PAJAK

| | | | |
|----------------------|----------------------|------|----------------------|
| | | | |
| BL | TH | s.d. | BL TH |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | | <input type="text"/> |

N P W P :

NAMA WAJIB PAJAK :

ALAMAT :

KOTA : KODE POS : NO. TELP :

NEGARA DOMISILI :

KANTOR PUSAT (KHUSUS BUT) :

JENIS USAHA : KLU :

BERDASARKAN PASAL 3 AYAT (4) UU KUP, DENGAN INI MENGAJUKAN PEMBERITAHUAN PERPANJANGAN JANGKA WAKTU PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN PPh WP BADAN TAHUN PAJAK YANG KE (.....) SAMPAI DENGAN TANGGAL :

DENGAN ALASAN :

PEMBUKUAN / LAPORAN KEUANGAN : DIAUDIT TIDAK DIAUDIT

NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK :

N P W P :

NAMA KANTOR KONSULTAN PAJAK :

N P W P :

| PERNYATAAN PENGHITUNGAN SEMENTARA PAJAK PENGHASILAN TERUTANG | | | RUPIAH |
|---|------------------------------|--|--------|
| A. PENGHASILAN KENA PAJAK | 1. | PENGHASILAN NETO FISKAL | |
| | 2. | KOMPENSASI KERUGIAN | |
| | 3. | PENGHASILAN KENA PAJAK (1-2) | |
| B. PPh TERUTANG | 4. | PPh YANG TERUTANG (TARIF PPh Ps. 17 X ANGKA 3) | |
| | 5. | PENGEMBALIAN / PENGURANGAN KREDIT PAJAK LN (PPh Ps. 24) YANG TELAH DIPERHITUNGKAN TAHUN LALU | |
| | 6. | JUMLAH PPh YANG TERUTANG (4 + 5) | |
| C. KREDIT PAJAK | 7. | PPh DITANGGUNG PEMERINTAH (PROYEK BANTUAN LN) | |
| | 8. | a. KREDIT PAJAK DALAM NEGERI | |
| | | b. KREDIT PAJAK LUAR NEGERI | |
| | | JUMLAH (a + b) | |
| | 9. | a. <input type="checkbox"/> PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI (6 - 7 - 8) | |
| | | b. <input type="checkbox"/> PPh YANG LEBIH DIPOTONG / DIPUNGUT | |
| | 10. | PPh YANG DIBAYAR SENDIRI | |
| | | a. PPh Ps. 25 BULANAN | |
| | | b. STP PPh Ps. 25 (HANYA POKOK PAJAK) | |
| | | c. PPh Ps. 25 AYAT (8) / FISKAL LUAR NEGERI | |
| d. PPh ATAS PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN ATAU BANGUNAN | | | |
| | JUMLAH (a + b + c + d) | | |

| | | | | RUPIAH |
|---|-----|--|---------------------|--------------|
| D. PPh KURANG / LEBIH BAYAR | 11. | a. <input type="text"/> PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh Ps. 29) (9 - 10) | > | |
| | | b. <input type="text"/> PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh Ps. 28A) | > | |
| E. ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN BERJALAN UTK PERIODE PENUNDAAN PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN | 12 | a. PENGHASILAN YANG MENJADI DASAR PENGHITUNGAN ANGSURAN | > | |
| | | b. KOMPENSASI KERUGIAN | > | |
| | | c. PENGHASILAN KENA PAJAK (a - b) | > | |
| | | d. PPh YANG TERUTANG (TARIF Ps. 17 X HURUF c) | > | |
| | | e. KREDIT PAJAK TAHUN PAJAK LALU ATAS PENGHASILAN YANG TERMASUK DALAM HURUF a | > | |
| | | f. PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI (d - e) | > | |
| | | g. PPh PASAL 25 : (1/12 X HURUF f) | > | |
| F. PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK | 13 | a. PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL PPh TERUTANG | > | |
| | | b. PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK PENGHASILAN BRUTO | > | |
| G. LAMPIRAN | 14 | BERSAMA INI DILAMPIRKAN : <input type="checkbox"/> SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR KE-3 PPh PASAL 29 <input type="checkbox"/> LAPORAN KEUANGAN SEMENTARA <input type="checkbox"/> SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR KE-3 PPh PASAL 26 AYAT (4) (KHUSUS BUT) <input type="checkbox"/> PERHITUNGAN SEMENTARA PPh PASAL 26 AYAT (4) (KHUSUS BUT) <input type="checkbox"/> SURAT KUASA KHUSUS (BILA DIKUASAKAN) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | | |
| H. PERNYATAAN | 15 | DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA TERMASUK SANKSI-SANKSI SESUAI DENGAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU, SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA BERITAHUKAN DI ATAS BESERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA ADALAH BENAR, LENGKAP DAN JELAS. | | |
| | | NAMA LENGKAP | JABATAN / KEDUDUKAN | TANDA TANGAN |
| | | | | |



DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

PEMBERITAHUAN
PERPANJANGAN JANGKA WAKTU
PENYAMPAIAN
SPT TAHUNAN PPh WP BADAN

KHUSUS BAGI WAJIB PAJAK YANG DIIZINKAN MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN DALAM
MATA UANG DOLLAR AMERIKA SERIKAT

FORMULIR

1771 - \$Y

• BERI TANDA X DALAM (KOTAK) YANG SESUAI
TAHUN : TAHUN TAKWIM TAHUN BUKU S.D

TAHUN PAJAK

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|

KEPADA KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK
DI

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---------------------|---|--|------|-----------------|--|--|--|--|--|
| A. | N P W P | : | | | | | | | | | | |
| B. | NAMA WAJIB PAJAK | : | | | | | | | | | | |
| C. | ALAMAT TEMPAT TINGGAL | : | | | | | | | | | | |
| D. | KELURAHAN/KECAMATAN | : | | | | | | | | | | |
| E. | KOTA/KODE POS | : | | | | | | | | | | |
| F. | NOMOR TELEPON / FAX | : | | | | | | | | | | |
| G. | BERDASARKAN PASAL 3 AYAT (4) UU KUP, DENGAN INI MENGAJUKAN PEMBERITAHUAN PERPANJANGAN JANGKA WAKTU PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN PPh WP BADAN TAHUN PAJAK YANG KE(.....) SAMPAI DENGAN TANGGAL DENGAN ALASAN SEBAGAI BERIKUT : | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| H. | PENGHITUNGAN SEMENTARA PAJAK PENGHASILAN TAHUN PAJAK YANG TERUTANG ADALAH SEBAGAI BERIKUT : | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | US\$ | RUPIAH (RIBUAN) | | | | | |
| 1. | PENGHASILAN KENA PAJAK | | | | | | 1. | | | | | |
| 2. | PPh YANG TERUTANG | | | | | | 2. | | | | | |
| 3. | PPh YANG DIPOTONG/DIPUNGUT OLEH PIHAK KETIGA DAN YANG TERUTANG/ DIBAYAR DILUAR NEGERI : | | | | | | | | | | | |
| | a. | PPh PASAL 22 | | | | | | | | | | |
| | b. | PPh PASAL 23 | | | | | | | | | | |
| | c. | PPh PASAL 24 | | | | | | | | | | |
| | d. | PPh DITANGGUNG PEMERINTAH | | | | | | | | | | |
| | JUMLAH (a + b + c + d) | | | | | | 3. | | | | | |
| 4. | a. | <input type="checkbox"/> PPh YANG HARUS DIBAYAR | b. | <input type="checkbox"/> PPh YANG LEBIH DIPOTONG/DIPUNGUT (2-3) | | | 4. | | | | | |
| 5. | PPh YANG DIBAYAR SENDIRI : | | | | | | | | | | | |
| | a. | PPh PASAL 25 | | | | | | | | | | |
| | b. | STP PPh PASAL 25 (HANYA POKOK SAJA) | | | | | | | | | | |
| | c. | FISKAL LUAR NEGERI | | | | | | | | | | |
| | d. | PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN | | | | | | | | | | |
| | JUMLAH (a + b + c + d) | | | | | | 5. | | | | | |
| 6. | a. | <input type="checkbox"/> PPh YANG MASIH HARUS DIBAYAR | b. | <input type="checkbox"/> PPh YANG LEBIH DIBAYAR (4-5) | | | 6. | | | | | |
| • JUMLAH PPh YANG MASIH HARUS DIBAYAR TERSEBUT PADA ANGKA 6a TELAH DILUNASI PADA TANGGAL | | | | | | | | | | | | |
| 7. | LAMPIRAN : | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> LAPORAN KEUANGAN SEMENTARA TAHUN | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> BUKTI PELUNASAN PPh YANG MASIH HARUS DIBAYAR TERSEBUT PADA ANGKA 6 a (SURAT SETORAN PAJAK) | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> SURAT KUASA KHUSUS, (BILA DIKUASAKAN) | | | | | | | | | | | | |
| 8. | ANGSURAN BULANAN PPh PASAL 25 (SEMENTARA) TAHUN 1/12 X JUMLAH PADA ANGKA 4a . | | | | | | | | | | | |
| 9. | TANDA TANGAN TGL | | | | | | | | | | | |
| | <input type="checkbox"/> | WAJIB PAJAK | TANDA TANGAN : | | | | | | | | | |
| | <input type="checkbox"/> | KUASA | NAMA TERANG : | | | | | | | | | |

CATATAN UNTUK DINAS :

DITERIMA TANGGAL :
NAMA PETUGAS :
N I P :
TANDA TANGAN :

Lampiran II
Peraturan Direktur Jenderal Pajak
Nomor : 21/PJ/2009
Tanggal : 02 Maret 2009

.....,20.....

Nomor :
Perihal : Pemberitahuan Perpanjangan Penyampaian SPT Tahunan
Lampiran : Satu Set

Yth.
Kepala Kantor Pelayanan Pajak.....
Di

Dengan hormat,

Sehubungan dengan jatuh tempo penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi yang akan segera berakhir, dengan ini saya:

Nama :
NPWP :
Alamat :

Memberitahukan untuk memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT Tahunan yang ke-.....(.....) sampai dengan tanggal....., dengan alasan bukti potong PPh Pasal 21 (Formulir 1721-A1 dan/atau Formulir 1721-A2) belum diberikan oleh Perusahaan.

Bersama ini saya lampirkan Surat Pernyataan dari Perusahaan yang menyatakan bukti potong PPh Pasal 21 (Formulir 1721-A1 dan/atau Formulir 1721-A2) belum diberikan oleh Perusahaan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

ttd

(.....)

Lampiran III
Peraturan Direktur Jenderal Pajak
Nomor : 21/PJ/2009
Tanggal : 02 Maret 2009



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP
KANTOR PELAYANAN PAJAK

Jalan.....

Telepon :

Tromol Pos

Fax :

Nomor : S-/WPJ.... /KP.... /PPh BD/OP^{*)}/200920.....

Perihal : Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan

Kepada Yth.

.....

.....

di

.....

Sehubungan dengan Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan Pajak Penghasilan yang Saudara ajukan dan diterima lengkap di KPP tanggal dengan ini diberitahukan bahwa permohonan Saudara:

- diterima sampai dengan tanggal^{*)}
- dianggap bukan sebagai Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan^{*)}

karena:.....
.....
.....
.....
.....

Demikian untuk dimaklumi

Kepala Kantor Pelayanan Pajak
.....

(.....)
NIP.

^{*)} Coret yang tidak perlu